

Peran Gereja Dalam Mempersiapkan Umat Katolik Menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024

Martalia Odi

Sekolah Tinggi Pastoral IPI Malang

Intansakti Pius X

Sekolah Tinggi Pastoral IPI Malang

Korespondensi penulis : lialia241095@gmail.com

Abstract. *The church essentially does not only refer to a physical structure or an organization but also as a community of Catholic believers. The Church is part of the world so the Church also takes part in the development and progress of the world, including participating in political life. This research aims to understand the extent of the church's role in preparing Catholics for the 2024 General Election, to find out the causes of Catholics' reluctance to participate in politics and the church's efforts to prepare Catholics for the 2023 Election. This research uses library methods by collecting information, analyzing and develop understanding of the information obtained. From the information obtained, it can be seen that the Church's ministry in the field of politics is a calling for the church to carry out its mission in the world as an embodiment of the Kingdom of God which is rooted in the Catholic faith.*

Keywords: *The Role of the Church, Catholics, General Elections*

Abstrak. Gereja pada hakekatnya tidak hanya mengacu pada struktur fisik atau suatu organisasi melainkan juga sebagai persekutuan umat beriman Katolik yang percaya. Gereja merupakan bagian dari dunia sehingga Gereja pun mengambil bagian dalam perkembangan dan kemajuan dunia, termasuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana peran gereja dalam mempersiapkan umat Katolik menuju Pemilihan Umum tahun 2024, mengetahui penyebab keengganan umat katolik untuk berpartisipasi dalam politik serta usaha gereja untuk mempersiapkan umat Katolik menuju Pemilu 2023. Penelitian ini menggunakan metode pustaka dengan mengumpulkan informasi, menganalisa dan mengembangkan pemahaman dari informasi yang diperoleh. Dari informasi yang diperoleh dapat dilihat bahwa karya pelayanan Gereja dalam bidang politik adalah sebuah panggilan bagi gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai perwujudan Kerajaan Allah yang berakar pada iman Katolik.

Kata kunci: Peran Gereja, umat Katolik, Pemilihan Umum.

LATAR BELAKANG

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “Gereja” diuraikan dalam dua pengertian yaitu pertama, mengacu pada struktur fisik, biasanya sebuah bangunan atau rumah, di mana orang Kristen berkumpul untuk terlibat dalam doa dan mengambil bagian dalam berbagai upacara keagamaan. Kedua, istilah ini mencakup konseptualisasi kelompok atau badan terorganisir yang terdiri dari individu-individu yang berbagi iman Kristen. Organisasi-organisasi gerejawi ini dicirikan oleh seperangkat kepercayaan, ajaran, dan praktik ibadah yang umum. Patut dicatat bahwa istilah “gereja” itu sendiri berasal dari asimilasi kata yang dipinjam dari bahasa asing, khususnya istilah Portugis “igreja”, yang dalam bahasa Yunani disebut juga “eklesia”, (Wiyono & Th, 1967).

Menurut E. Martasudjita, Pr, Gereja dapat didefinisikan sebagai kolektif individu yang dipersatukan oleh kepercayaan bersama mereka dalam iman Kristen, serta partisipasi aktif mereka dalam sakramen Gereja, yang dalam tradisi Katolik mengacu pada tujuh sakramen. Selain itu, individu-individu ini juga dibimbing oleh kepemimpinan Gembala yang sah, dengan penekanan khusus pada otoritas eksklusif yang dipegang oleh Uskup Roma, yang diakui sebagai satu-satunya wakil Kristus di bumi. (Wiyono & Th, 1967).

Gereja, pada intinya, dianggap sebagai komunitas suci yang terdiri dari individu-individu yang berbagi keinginan tak tergoyahkan untuk terlibat dalam tindakan ibadah untuk menghormati dan memuliakan Tuhan. Ini berfungsi jauh lebih dari sekadar ruang fisik di mana individu secara pasif mendengarkan khotbah dan menerima makanan spiritual; sebaliknya, itu adalah lingkungan dinamis yang mengundang partisipasi aktif dan pertukaran timbal balik. Dalam hal ini, gereja berfungsi sebagai manifestasi nyata dari keyakinan dan dedikasi yang mengakar dalam dari jemaatnya, melayani sebagai persekutuan yang memupuk pertumbuhan dalam iman dan dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menyebarkan pesan transformatif Yesus Kristus ke seluruh penjuru dunia.

Dalam sidang Konsili Vatikan II telah ditekankan bahwa Gereja hendaknya masuk dalam dunia sebab Gereja adalah bagian dari dunia. Dalam “*Gaudium et Spes*”, juga disebut sebagai “*Sukacita dan Harapan*” menggali tema penting martabat manusia serta partisipasi aktif Gereja Katolik dalam masalah politik yang berputar di sekitar kepentingan bersama (*bonum commune*), (Kristina et al., 2024). Hal ini berarti gereja tidak hanya tinggal dan menetap dalam dirinya sendiri yang berpusat pada liturgi dan peribadatan melainkan mengambil bagian dalam kehidupan duniawi, salah satunya adalah berpartisipasi dalam dunia politik.

Menurut B. A. Rukiyanto Gereja Indonesia memandang dirinya sebagai institusi yang memulai perjalanan spiritual kolektif bersama semua individu Indonesia untuk mendorong pertumbuhan dan kemakmuran bangsa. Akibatnya, Gereja Katolik Indonesia mengalami rasa gembira dan antisipasi yang mendalam bersamaan dengan seluruh komunitas, saat mereka menyaksikan kemajuan bangsa, (Firmanto, n.d.). Sentimen ini semakin memperkuat ikatan antara Gereja dan rakyat, karena mereka berbagi dalam aspirasi dan impian kolektif untuk perbaikan negara yang mereka cintai. Gereja Indonesia sangat percaya bahwa peran mereka melampaui bimbingan rohani, karena mereka secara aktif terlibat dalam proses pembangunan bangsa, bekerja sama dengan rakyat Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Salah satu bentuk keterlibatan Gereja dalam usaha pembangunan bangsa ini adalah terlibat dalam pemilu 2024.

Pemilu menjadi peristiwa yang signifikan bagi partai-partai politik demokrasi dalam konteks Republik Indonesia, di mana tujuannya adalah untuk memilih individu yang akan secara efektif melaksanakan kedaulatan yang dipercayakan kepada mereka oleh rakyat. Pemilu ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip *luber jurdil*, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang meliputi berbagai aspek penting seperti partisipasi langsung, inklusivitas, kebebasan, kerahasiaan, integritas, dan kesetaraan. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar ini, sistem pemilu Indonesia memastikan bahwa prosesnya tetap adil, transparan, dan tidak memihak. Penting untuk ditekankan bahwa pemilu ini berlangsung di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menandakan persatuan dan koherensi bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, proses pemilu memainkan peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang mendukung sistem politik Indonesia menuju pemilu 2024.

Menurut peraturan dalam Undang-undang Nomor. 7 tahun 2017, mengatakan bahwa Pemilihan umum berfungsi sebagai mekanisme di mana kedaulatan rakyat dilaksanakan untuk memilih individu yang akan menjabat sebagai perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, pemilu ini juga digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Proses ini dilakukan secara langsung dan publik, memberikan kebebasan kepada warga negara untuk berpartisipasi secara rahasia, jujur, dan adil. Penting untuk dicatat bahwa pemilu ini dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dipandu oleh prinsip-prinsip Pancasila, serta Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberlakukan pada tahun 1945 (Kristina et al., 2024).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa gereja dalam perziarahannya terus mengambil bagian dalam karya perutusan Kristus di dunia, karena pada hakekatnya gereja bukan saja sebagai sebuah gedung atau organisasi melainkan sebagai pribadi-pribadi atau persekutuan umat Allah yang memiliki tugas dan tanggung jawab bukan hanya dalam hal intern gereja melainkan turut mengambil bagian dalam perkembangan dunia, termasuk terlibat dalam politik dengan berpartisipasi dalam pemilu. Oleh karena itu Gereja berperan penting melalui untuk mempersiapkan umat katolik untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui dan memahami sejauh mana peran Gereja Katolik dalam mempersiapkan umat Katolik menuju Pemilihan Umum yang telah dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

KAJIAN TEORITIS

Dalam Apostolicam Actuositatem 3 mengatakan: “Kaum awam menerima tugas serta haknya untuk merasul berdasarkan persatuan mereka dengan Kristus Kepala. Sebab melalui Baptis, mereka disaturagikan dalam Tubuh Mistik Kristus, melalui penguatan mereka diteguhkan oleh kekuatan Roh Kudus, dan dengan demikian oleh Tuhan sendiri ditetapkan untuk merasul..... Kerasulan dijalankan dalam iman, harapan, dan cinta kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus dalam hati semua anggota Gereja, (Bagi et al., 2017)

Konsili Vatikan II mengajak umat Katolik: “warga negara kedua pemukiman, supaya dijiwai oleh semangat Injil mereka berusaha menunaikan dengan setia tugas-kewajiban mereka di dunia, (Seri Dokumen gerejawi No 65, 2003), yang menekankan peran umat Katolik sebagai warga negara.

Eklesiologi Trente memberi penekanan kuat terhadap konsep Gereja sebagai sebuah "Institusi Sosial" yang terpisah dari kehidupan publik dan memiliki kekuasaan, hukum dan tata pemerintahan sendiri (Wilhelmus, 1967).

Albertus Soegijapranata dalam semboyannya yang terkenal yaitu “Seratus Persen Katolik, Seratus persen Indonesia” memberikan makna pengungkapan diri umat Katolik Indonesia dalam menunjukkan jati dirinya sebagai warga Gereja yang sekaligus juga warga negara Indonesia,(Filsafat et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pustaka, yang mana sangat bergantung pada sumber dan materi yang ditemukan dalam lingkungan perpustakaan untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Melalui pemeriksaan sistematis dan analisis berbagai teks, publikasi, dan karya ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kedalaman topik penelitian yang dipilih secara menyeluruh. Dengan mengumpulkan berbagai informasi yang tersedia di perpustakaan, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi seluk-beluk dan nuansa situasi yang terjadi, sehingga meningkatkan validitas dan keandalan keseluruhan temua. Dengan berbagai informasi yang tersedia, peneliti lalu menganalisis dan mengevaluasi literatur yang ada secara kritis untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh dan terinformasi tentang subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Panggilan Gereja untuk Berpolitik

Politik berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani, yang mengacu pada pemerintah kota atau kota. Konsep politik dapat digambarkan sebagai manajemen yang terampil dari urusan masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kolektif dan kesejahteraan secara keseluruhan, di mana melibatkan memungkinkan individu dewasa untuk membangun, menegakkan, dan meningkatkan peraturan yang mengatur komunitas untuk perbaikan dan saling menguntungkan para anggotanya,(Wilhelmus, 1967).

Oleh karena itu, berpartisipasi dalam bidang politik menjadi sebuah panggilan bagi Gereja dalam karya pelayanannya sebagai warga negara demi mewujudkan Kerajaan Allah di tengah dunia melalui kesejahteraan yang diperjuangkan bagi sesama yang berakar dalam iman yang teguh, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab nabi Yeremia, “Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu”(bdk Yeremia 29:7),(Wilhelmus, 1967) sehingga dimana pun umat Allah berada, tidal memisahkan dirinya dari situasi sosial kemasyarakatan di mana ia berpijak.

Albertus Soegijapranata dalam Surat Gembala Prapaskah tanggal 6 Februari 1956 menegaskan:

“Jika kita sungguh-sungguh Katolik sejati, kita sekaligus patriot sejati. Karenanya, kita merasa seratus persen patriot justru karena kita adalah seratus persen Katolik. Lagi pula, bukankah menurut perintah keempat dari Sepuluh Perintah Allah kita wajib mencintai Gereja yang kudus, juga wajib mencintai negara, dengan seluruh hati kita? Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah.”(Filsafat et al., 2023)

Semboyan Albertus yang sangat terkenal disemua kalangan yaitu “Seratus Persen Katolik, Seratus persen Indonesia” (Filsafat et al., 2023) menghimbau agar umat Katolik tidak hanya mengambil bagian dalam urusan Gereja saja, melainkan ikut terlibat aktif dalam semua kegiatan bermasyarakat dan bernegara. Selama manusia hidup dalam suatu negara, manusia tidak pernah terlepas dari hak dan kewajiban yang harus dijalankannya. Oleh karena itu, tindakan terlibat dalam politik dianggap sebagai panggilan ilahi bagi umat Katolik untuk berpartisipasi aktif dalam proses membimbing dan mengarahkan jalannya dan pembangunan bangsa.

Dalam kerangka ini, umat Katolik memiliki hak dan tanggung jawab terhadap komunitas yang lebih besar, negara, dan bangsa secara keseluruhan atau dengan kata lain semua komponen-komponen yang ada di dalamnya termasuk nilai-nilai Pancasila, dengan cermat mendefinisikan dan menghidupi prinsip-prinsip dasar Pancasila, dan dengan sungguh-sungguh menerapkan sebagai landasan dasar di mana Negara dibangun, semuanya sesuai dengan ajaran Gereja Katolik.

Lebih jauh lagi, umat Katolik tidak hanya diharapkan tetapi juga didorong untuk mengambil posisi di dalam aparatur pemerintahan, sehingga secara langsung membenamkan diri dalam ranah politik. Akan dianggap tidak pantas dan tidak sesuai bagi umat Katolik untuk hanya tetap berada di pinggir struktur dan sistem politik, menjauhkan diri dari keterlibatan aktif, terutama jika mereka disertai dengan aliran komentar dan kritik yang terus menerus tanpa menawarkan kontribusi yang perlu untuk tugas mulia pembangunan bangsa.

Gereja Dalam Memepersiapkan Umat Katolik Menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024

Di era saat ini, patut diapresiasi bahwa dalam masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, ada iklim yang benar-benar memupuk nilai-nilai kebebasan dan otonomi. Dalam masyarakat seperti itu, individu dari semua lapisan masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan kelompok politik. Pendekatan semacam ini mengharuskan munculnya kesadaran akan peran baru bagi masyarakat dalam kehidupan publik baik bagi orang katolik non Katolik. Perlu ditekankan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkontribusi, tidak hanya melalui partisipasi mereka dalam pemilihan yang menentukan komposisi badan legislatif dan pejabat pemerintah tetapi juga dengan cara lain yang berkontribusi pada penyelesaian masalah politik yang rumit dan penciptaan kerangka kerja legislatif yang, dalam perspektif mereka, pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sangat penting untuk menyadari bahwa semangat dan efektivitas masyarakat demokratis bergantung pada keterlibatan aktif, bertanggung jawab, dan murah hati setiap warga negara dan akan kesadarannya dalam hidup berpolitik.

Berdasarkan catatan ajaran pada beberapa pertanyaan berhubungan dengan peran serta umat katolik di dalam kehidupan politik, dikatakan bahwa:

“Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban kewarganegaraan mereka, “yang dibimbing oleh suara hati Kristiani”, sesuai dengan nilai-nilainya, kaum awam beriman melaksanakan tugas yang tepat memasuki tatanan duniawi dengan nilai-nilai Kristiani,

sementara sekaligus menghormati hakekat dan otonomi sepenuhnya dari tatanan itu, dan bekerja sama dengan warga negara lain menurut kompetensi dan tanggung jawab khusus mereka” (Seri Dokumen gerejawi No 65, 2003)

Melalui hal ini dapat dikatakan bahwa umat Katolik tidak bisa memisahkan peran dan tanggung jawab mereka untuk mengambil bagian dalam perkembangan dunia, dalam hal ini tatanan hidup berbangsa dan bernegara dengan menghormati kebijakan yang berlaku didalamnya.

Sejauh mata memandang, Gereja Katolik Indonesia dianggap menunjukkan kelesuan dalam kemampuannya untuk segera bereaksi terhadap perkembangan politik dan kecenderungan untuk mengadopsi pendekatan pasif dalam menangani seluk-beluk kehidupan politik. Persepsi khusus ini telah dianggap sebagai topik yang dianggap tidak dapat diterima secara sosial oleh bagian masyarakat tertentu, mengingat bahwa keterlibatan Gereja Katolik dalam urusan politik secara tradisional tidak dianggap berada dalam domainnya. Namun, skenario saat ini telah menyaksikan pergeseran dalam sikap ini, karena Gereja Katolik telah mengambil peran yang lebih aktif dengan mengambil posisinya sebagai lembaga keagamaan.

Situasi-situasi kenegaraan yang terjadi sekarang ini pun dapat menjadi pemicu bagi umat Katolik untuk takut mengambil bagian secara lebih berani dalam berpolitik, diantaranya : 1) Situasi agama dan radikalisme, terorisme yang dianggap sebagai sumber kejahatan, 2) Moderasi hidup beragama yang tidak sehat, 3) Politik yang berbau agama, 4) Egoisme yang masih menjadi gejala dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, juga menyangkut hubungan kelembagaan antar lembaga negara, daerah, kelompok, dan lain-lain, (Bangsa et al., 2023). 4) Terkikisnya idealisme kebangsaan yang tampak dalam sikap ketidakpedulian terhadap kaum lemah dan minoritas.

Selain hal itu, adapun tantangan-tantangan dari dalam hidup menggereja itu sendiri yaitu: 1) Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, secara khusus dalam kaitannya dengan dinamika politik, Gereja hadir dalam suasana yang penuh dengan berbagai kepentingan yang saling menarik dan bertentangan. Untuk tujuan politik praktis, keterlibatan gereja dapat dilihat sebagai “jebakan” bagi mereka yang ingin memperoleh kekuasaan, atau juga bagi mereka yang ingin mempertahankan kekuasaan. 2) Bila dilihat kembali sejarah kehadiran Gereja Katolik Roma di nusantara, yang sampai saat ini masih ada anggapan di sebagian kalangan masyarakat yang bahwa sebagai perwujudan budaya barat, sering dikaitkan dengan eksistensi kolonial bangsa-bangsa Eropa di masa lalu atau dengan kata lain agama penjajah. 3) Kerap kali umat dipengaruhi oleh pikiran negatif terhadap lingkungan sosial masyarakatnya. (Bangsa et al., 2023)

Adapun usaha-usaha Gereja dalam mempersiapkan umat Katolik menuju pemilu 2024 adalah:

a. Melalui Pendidikan Politik.

Holdar and Zakharchenko, menyebutkan bahwa pendidikan merupakan pendidikan publik (public education), yaitu usaha untuk melibatkan warga negara dalam suatu komunitas untuk menciptakan budaya partisipasi, yang dalam hal ini adalah bidang politik, (Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D., 2019). Pendidikan politik ini sangat dibutuhkan agar warga negara termasuk umat katolik meningkatkan partisipasinya di bidang politik sebagai suatu bentuk pelayanannya dalam keberadaannya di tengah masyarakat.

b. Membangun penyadaran umat bahwa politik merupakan panggilan.

Inilah yang dipikirkan oleh ajaran Gereja Katolik kepada umatnya bahwa merupakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang tujuannya adalah membicarakan pengelolaan masyarakat guna mencapai kesejahteraan umum seluruh anggota masyarakat, (Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D., 2019). Hal ini didasari oleh panggilan sebagai orang Katolik untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia melalui rahmat pembaptisan yang diterimanya.

c. Melalui seminar kebangsaan.

Melalui seminar kebangsaan, umat katolik diberi pemahaman akan pandangannya tentang realitas dirinya sebagai anggota suatu bangsa yang memberi pandangan kepada masyarakat tentang diri sendiri secara keseluruhan, yaitu realitas diri sebagai bangsa yang multikultural (beragam adat istiadat dan budaya) dan hidup dalam ruang hidup yang terpisah secara geografis, dan yang terpenting adalah sikap dan semangat untuk saling berhadapan dan selalu bersatu. ketika menang. semua kenyataan, tantangan bersama, (Bangsa et al., 2023).

d. Melalui katekese kenegaraan

Melalui katekese yang diadakan di tingkat keuskupan, peroki lingkungan atau pun komunitas-komunitas, umat Katolik dihimbau untuk bijak dalam memilih pemimpin masa depan yang berkarakter, berintegritas, dan komperhensif.

e. Berpartisipasi dalam Pemilihan Umum

Pemilu 2024 mengajak umat untuk berpartisipasi sehingga dipastikan agar semua masyarakat khususnya umat Katolik memastikan bahwa dirinya terdaftar sebagai pemilih.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berpartisipasi dalam bidang politik menjadi sebuah panggilan bagi Gereja dalam karya pelayanannya sebagai warga negara demi mewujudkan Kerajaan Allah di tengah dunia melalui kesejahteraan yang diperjuangkan bagi sesama yang berakar dalam iman.

Melalui hal ini dapat dikatakan bahwa umat Katolik tidak bisa memisahkan peran dan tanggung jawab mereka untuk mengambil bagian dalam perkembangan dunia, dalam hal ini tatanan hidup berbangsa dan bernegara dengan menghormati kebijakan yang berlaku didalamnya.

Gereja Katolik Indonesia dianggap menunjukkan kelesuan dalam kemampuannya untuk segera bereaksi terhadap perkembangan politik dan kecenderungan untuk mengadopsi pendekatan pasif dalam menangani seluk-beluk kehidupan politik karena berbagai situasi yang terjadi.

Situasi-situasi kenegaraan yang terjadi sekarang ini pun dapat menjadi pemicu bagi umat Katolik untuk takut mengambil bagian secara lebih berani dalam berpolitik, diantaranya : 1) Situasi agama dan radikalisme, terorisme yang dianggap sebagai sumber kejahatan, 2) Moderasi hidup beragama yang tidak sehat, 3) Politik yang berbau agama, 4) Egoisme yang masih menjadi gejala dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa 5) Terkikisnya idealisme kebangsaan yang tampak dalam sikap ketidakpedulian terhadap kaum lemah dan minoritas..

Usaha-usaha Gereja dalam mempersiapkan umat Katolik menuju pemilu 2024 adalah: 1) Melalui Pendidikan Politik. 2) Membangun kesadaran umat bahwa politik merupakan panggilan. 3) Melalui seminar kebangsaan. 4) Melalui katekese kenegaraan 5) Berpartisipasi dalam Pemilihan Umum.

DAFTAR REFERENSI

- Bagi, D. A. N. R., Galih, L., Pambudi, W., Cinta, G., Sari, G., Wilhelmus, O. R., Mengenai, S., Hidup, D., Dwi, N., Ketut, A. I., Wijaya, D., Panca, P., Gereja, T., & Eko, Y. (2017). Kerasulan awam di bidang politik (sosial kemasyarakatan) dan relevansinya bagi muktikulturalisma Indonesia.
- Bangsa, K., Keutuhan, D. A. N., & Kesatuan, N. (2023). SEMINAR NASIONAL FILSAFAT TEOLOGI. 38–48.
- Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D., M. A. P. *yuwantosaja@gmail. co. (2019). PERAN GEREJA KATOLIK KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG DALAM PENDIDIKAN POLITIK UMAT MENJELANG PEMILU TAHUN 2019 Drs.
- Filsafat, F., Katolik, U., & Thomas, S. (2023). Seratus Persen Katolik, Seratus Persen Indonesia: Uraian Deskriptif Kritis atas Pandangan Albertus Soegijapranata mengenai Jiwa Nasionalisme Umat Katolik Indonesia Sebagai Warga Negara Indonesia 1,2. 20(2), 59–66.
- Firmanto, A. D. (n.d.). Lumen veritatis. <https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v10i1.208>
- Kristina, E., Puguh, H., Halomoan, S., Sitinjak, F., & Achmed, A. (2024). Tantangan dan Upaya Penanganan Politik Identitas pada Pemilu 2024. 7(1), 424–434.
- Seri Dokumen gerejawi No 65. (2003). Peran serta umat katolik di dalam kehidupan politik. 65.
- Wilhelmus, O. R. (1967). 12 Pintu Evangelisasi: Menebar Garam di Atas Pelangi. Wina Press, 1(69), 180–194.
- Wiyono, S., & Th, M. (1967). Peran Gereja dalam Perpolitikan di Indonesia.